BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan RasulNya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di alam maupun di luar peraturan. Berkenaan dengan perkawinan, akan timbul hubungan antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dengan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan menimbulkan hubungan hukum antar mereka dengan harta kekayaan tersebut.²

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Legal Center Publishing, 2007), h. 1.

berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.³ Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, bahwa dikarenakan sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan turunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadikah dan kewajiban orangtua.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 37.

sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.⁵

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.⁶ Nani Suwondo juga mengemukakan pengertian perkawinan⁷ sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin⁸, mengatakan bahwa:

“Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.74.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), h. 6.

⁷ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1970), h. 12.

⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 19.

bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata *Zawaj*. Kemudian yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah Akad (*ijab qabul*) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁹

Dari segi pengertian di atas bisa dikatakan jika seseorang belum pernah menikah, artinya bahwa seseorang tersebut belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap *ijab aqad* nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan anak itu lahir di luar kawin, artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Aturan tata-tertib perkawinan pada hakikatnya juga sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial

⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1976), h. 1.

Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹⁰

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan¹¹ adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang sah merupakan sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, sehingga suami-isteri serta anak-anak dapat hidup secara tentram dan bahagia. Selain itu perkawinan bukan saja merupakan kepentingan dari orang yang melangsungkannya, tetapi juga merupakan kepentingan keluarga dan masyarakat. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya.

Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum yang berlaku dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan.*, h. 1.

¹¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian seumur hidup di antara seorang pria dan seorang wanita. Sejalan dengan hal ini, masyarakat Indonesia memaknai Perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci dan sakral. Hal ini dapat terlihat jelas dari norma kebiasaan dan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih menentang keras adanya hubungan seksual di luar perkawinan atau zina. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa Perkawinan harus dilandaskan oleh ajaran agama atau kepercayaan yang mereka yakini.

masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.¹² Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹³

Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu artinya perkawinan yang sah apabila telah tercatat sesuai dengan peraturan perundangan. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.¹⁴ Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.¹⁵

Menurut salah satu ulama Fiqih yaitu Imam Syafii dalam perkawinan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat keabsahan akad (yakni wali dan saksi); satu syarat untuk keterikatan (yakni sekufu); satu syarat wajib untuk akad (yaitu maskawin).

Syarat saksi dalam pernikahan adalah merdeka, laki-laki, adil meski hanya dari segi zhahir, bisa mendengar dan bisa melihat.¹⁶ Menurut pendapat yang shahih, perkawinan tetap sah, meski adil tidaknya saksi tidak diketahui dengan jelas keislaman dan kemerdekaannya. Namun bila kefasikan saksi itu baru tersikap saat akad, menurut Mazhab Syafi’i, pernikahannya jadi batal, karena tidak adanya sifat

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019., h. 25

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 227.

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁵ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i (Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits)*, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 458.

adil. Kefasikan tersebut bisa diklarifikasi dengan bukti atau diketahui kedua mempelai.¹⁷

Dahulu syarat perkawinan tidak ada syarat pencatatan, namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pencatatan menjadi ketentuan sahnya perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau dikemudian hari terjadi pencatatan yang dipalsukan, maka jika diqiyaskan dengan pendapat Imam Syafii tentang syarat pernikahan yang dipalsukan, maka pernikahannya menjadi *fasid* (rusak) atau dapat dibatalkan.¹⁸

Menurut penulis adanya kesan pembatalan perkawinan ini pada dasarnya terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, h. 459.

¹⁸ Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Lihat: Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37.

Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil*. Al-jaziry menyatakan bahwa *nikah fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan *nikah al-batil* adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum *nikah al-fasid* dan *al-batil* adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang perkawinan *nikah al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. Lihat: Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), h. 25.

munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Bila meniliknya dalam Hukum Positif di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dibatalkan pernikahannya. Demikian juga sebagaimana dalam Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.¹⁹

Dalam studi kasus yang terjadi di Mataram bahwa telah terjadi perkawinan antara X (suami) dengan Y (istri) puluhan tahun. Pada tahun ke 21, Y mengajukan cerai dengan komulasi *hadhanah* dan harta bersama di Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian tersebut, pihak X sudah menyampaikan dalam jawabannya bahwa pihak X dengan Y tidak pernah terjalin perkawinan yang sah. Namun, dalam proses persidangan pihak Y sanggup membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Y dengan X dengan Kutipan Akta Nikah.

¹⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, h. 507.

Pada putusan tingkat pertama Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.MTR menyatakan mengabulkan gugatan cerai dengan komulasinya. Itu artinya X dan Y terikat dengan perkawinan yang sah lalu setelah melalui proses persidangan, maka X dan Y dinyatakan telah bercerai. Putusan ini dibacakan pada tanggal 8 Januari 2014.

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2014 dibacakan putusan Banding Nomor 0031/Pdt.G/2014/PTA.MTR, yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut. Demikian juga pada putusan Kasasi Nomor 66 K/Ag/2015 yang diputus pada tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya menolak permohonan kasasi dan Putusan Kasasi Nomor 299 K/Ag/2015 yang diputus pada tanggal 30 Maret 2015 yang amarnya menolak permohonan kasasi, itu artinya memutuskan menguatkan putusan tingkat banding.

Pihak X juga telah melakukan Peninjauan Kembali yang telah diputus pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan Nomor Putusan 47 PK/Ag/2016. Isi putusannya menyatakan menolak PK. Berarti putusan tingkat pertama masih dikuatkan.

Pihak X selanjutnya mengajukan gugatan dengan perihal perbuatan melawan hukum terhadap Y ke Pengadilan Negeri. Oleh Pengadilan Negeri setelah melalui proses persidangan dengan pembuktian yang diteliti ulang, ternyata pihak Y terbukti melakukan pemalsuan kutipan akta nikah. Putusan dengan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2017. Lalu putusan Tingkat I tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/PDT/2018/PT.MTR yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2018.

Berdasarkan kasus tersebut peneliti akan membahas permasalahan ini dalam sebuah disertasi yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Yang Pencatatannya

Dipalsukan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/Ag/2015).

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk membahas dan menggali lebih jauh mengenai status hukum perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan baik dari sisi metodologi maupun dari sisi implementasinya dengan tetap mempertimbangkan pada aspek hukum dan aspek sosiologisnya. Guna memfokuskan penelitian ini, maka akan dipaparkan rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah status perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa pencatatan?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat sasaran, maka penulis hanya membatasi berkaitan dengan status hukum perkawinan yang pencatatannya ternyata dipalsukan. Penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama sampai dengan Putusan Kasasi yang memutuskan Perceraian suami istri dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri sampai putusan Banding yang menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dijadikan bukti pernikahan ternyata palsu. Hukum positif yang dimaksud dalam disertasi ini

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Ruju', Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum, serta Hukum Islam yang terkodifikasi pada Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing masing. Dengan akta tersebut,

suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan.

Agar suatu perkawinan dapat dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan dapat terjadi pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan. Pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan yang berbentuk surat merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan Pasal 263 dan Pasal 264 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pembaca, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul, sehingga diharapkan adanya kesamaan makna dan pemahaman antara penulis dan pembaca dalam memahami topik-topik selanjutnya. Adapun istilah yang terdapat dalam disertasi ini adalah: Status, Hukum Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dan Pemalsuan.

1. Status adalah suatu keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Kata "status" pada

mulanya berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu kondisi seseorang berdasarkan aturan hukum. Pada perkembangannya, istilah status kemudian diadopsi oleh sosiologi untuk menjelaskan mengapa interaksi sosial antar individu atau kelompok berbeda dan apa yang menentukan setiap individu menjalankan peran sosialnya yang berbeda.²⁰

2. Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal.²¹

Perkawinan disamping sebagai suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial yang memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok, perkawinan juga dipahami sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual.

3. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai

²⁰ Basrowi dalam Baharuddin, *Sosiologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Genta Ghalia Indonesia, 2008), h. 17.

²¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Lihat: Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 20.

syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.²²

Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu keabsahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan keabsahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

²² Al-Quran dan al-Hadist pada dasarnya tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 26.

4. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya.²³
5. Hukum Positif dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan di tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim.²⁴ Hukum Positif yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam adalah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis secara komprehensif status hukum perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan menurut hukum positif dan hukum Islam;

²³Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 44.

²⁴ Hukum Positif juga diartikan sebagai sebuah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Lihat: I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 56.

2. Untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum hakim terhadap perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan;
3. Untuk menganalisis secara komprehensif akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa pencatatan dan atau perkawinan yang pencatatannya dipalsukan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan pengembangan hukum teoritis dan praktis bagi hakim yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi para hakim tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak yang ditimbulkan dari perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan.
2. Secara praktis, ketika hukum dipahami sebagai undang-undang maka dipastikan hukum selalu dalam posisi akan tertinggal oleh fakta sebagai akibat dinamika sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat mengenai adanya penyelesaian hukum perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan.

G. Kerangka Teori

Dalam hukum Islam, kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah *fardhu kifayah*, harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu

kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al-Mawardi di dalam buku *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menegaskan bahwa kegiatan peradilan adalah merupakan bagian pemerintah dalam rangka bernegara.²⁵

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.²⁶ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR dan R.Bg serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada Pasal-Pasal tertentu untuk menyesuaikan

²⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 122-142.

²⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 6.

dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.²⁷ Tugas dan kewenangan Peradilan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.²⁸ Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah. Salah satu sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas ke-Islaman. Asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata kewarisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi, luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak

²⁷Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

²⁸Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara...*, h. 109.

yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.²⁹

Abdul Manan menyatakan bahwa syariat Islam memandang masalah peradilan merupakan suatu tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum, ia merupakan lembaga yang diharapkan menjadi tempat memancarnya sinar keadilan kepada seluruh masyarakat. Keadilan tersebut telah diformulasikan dalam al-Qur'an dengan kata 'adl sebanyak 28 kali dan dengan kata *qisth* sebanyak 25 kali yang keduanya mengandung makna tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.³⁰

Keadilan adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata "adil" yang berarti sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil atau keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat.³¹ Pengertian ini sangat umum, bahkan keumumannya menjadikan pengertian adil sangat abstrak, sehingga sulit membedakan antara yang adil dan tidak adil. Keadilan menyangkut nilai etis yang dianut dan diyakini setiap individu dan masyarakat tertentu, sehingga satu peristiwa, boleh jadi dinilai adil oleh salah satu pihak tetapi pihak lain menganggapnya tidak adil, karena keadilan sangat subyektif dan abstrak sifatnya. Subyektifitas rasa keadilan sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi seseorang.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 147-148.

³⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 1-2.

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 8.

Selanjutnya dalam memahami dan menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum, teori *maqashid asy-syar'iyah* dan teori hukum progresif.

Teori Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filsafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan, sehingga kemudian para teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolak ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah-lah yang menjadi tolak ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan. Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari³², bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, sehingga segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.

³² Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 53-58.

Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Allah Swt berfirman dalam QS.

Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam berdasarkan ayat di atas pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi

haknya dengan kadar yang seimbang.³³ Ringkasnya bahwa keadilan pada dasarnya merupakan asas, titik tolak, proses dan sasaran dari ditetapkannya hukum Islam itu sendiri.

Achmad Ali dalam bukunya berjudul "menguak teori hukum dan teori peradilan" mengatakan bahwa pemahaman tentang makna keadilan sangat beragam. Ada yang mengaitkan keadilan dengan regulasi negara, sehingga nilai (ukuran) keadilan senantiasa didasarkan pada hasil regulasi negara itu sehingga pada akhirnya diketahui hak atau bukan. Ada juga yang memandang keadilan sebagai perwujudan kemauan yang tetap dan terus menerus untuk memberikan hak kepada setiap orang. Ada pula yang memandang bahwa keadilan adalah sebuah pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperhadapkan dengan kesewenangan. Ada pula yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya di ruang pengadilan, tetapi di manapun berada, dan bersih dari kotoran skandal dan korupsi.³⁴

Berbicara mengenai keadilan, sering salah dimengerti sebagian orang, seolah-olah keadilan itu hanya ada dan bisa diperoleh dari lembaga peradilan beserta seluruh proses yang menyertainya, sebagaimana sering diistilahkan dengan sebutan pro justisia. Padahal sesungguhnya, kewenangan polisi, jaksa dan hakim dalam bentuk penegakan hukum yang berarti menuntut penegakan keadilan, sangat kecil jika dibandingkan dengan tuntutan keadilan di bidang eksekutif dan legislatif.

³³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet.II (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.129

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 222.

Selain itu, penegakan keadilan di luar proses yudisial justru memberi dampak yang besar, bahkan luar biasa di masyarakat.

Meskipun porsinya sangat kecil, penegakan keadilan *pro justisia* tersebut dalam kenyataannya menarik perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Boleh jadi hal ini dilatari adanya harapan yang besar dari masyarakat agar pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan keadilan, benar-benar berjalan adil. Meskipun demikian, harapan besar masyarakat tersebut, tidak boleh berubah menjadi tekanan kepada pengadilan yang berimplikasi pada sebuah ketidakadilan. Menurut Bagir Manan, di masa orde lama dan orde baru, hakim tidak atau kurang bebas karena tekanan pemerintah, tetapi di era reformasi ini para penegak keadilan justru mendapat tekanan yang lebih banyak, bukan hanya tekanan dari opini pejabat, tetapi juga dari pers, pengamat, dan sebagainya.³⁵ Warga masyarakat sebagai bagian dari sub sistem hukum³⁶, harus pula bersatu padu mewujudkan keadilan horizontal di antara warga, dan keadilan vertikal dengan pemerintah untuk meminimalisir munculnya perkara, baik pidana maupun perdata. Keadilan sempurna yang diharapkan dari hasil olah pikir dan kerja manusia tentu tidak pernah ada, pencapaian keadilan hanyalah sampai pada kadar tertentu, bahkan ada yang meyakini bahwa keadilan itu adalah kelayakan.³⁷

Selanjutnya *Teori Kepastian Hukum* adalah suatu teori yang menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sudah sesuai

³⁵ Bagir Manan, *Revitalisasi dan Reorientasi Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No.314 Januari 2012, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia), h. 5.

³⁶ Sistem hukum memuat tiga sub sistem, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.

³⁷ Bagir Manan, *Revitalisasi dan Reorientasi...*, h. 5.

dengan kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan manakala terjadi multitafsir. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Kepastian hukum pada hakikatnya sangatlah erat kaitannya dengan asas Legalitas yang tujuannya untuk menertibkan masyarakat. Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah Swt, dimana hukum yang berasal dari Allah Swt sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 59 :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ وَإِنَّا لَمَّا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا
ظَالِمُونَ

Artinya: “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku, yang berarti ada kepastian hukum di dalamnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap Undang-Undang baru yang bisa berlaku setelah diundangkan seperti yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan mendapat kepastian hukum.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Ini artinya bahwa hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan, serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selanjutnya Teori *maqashid asy-syar'iyah* adalah merupakan sebuah teori yang menegaskan bahwa disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Teori ini dalam istilah filsafat hukum identik dengan teori "*mashlahah*". Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini, lalu dikembangkan oleh Al-Ghazali; seorang murid yang sangat ahli dalam teori hukum Islam yang kemudian memfokuskannya pada prinsip "*maqashid asy-syar'iyah*".

Pembicaraan tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan *ushul fiqh* dan ulama lain membatasinya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam *fiqh*, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam,

yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Allah Swt berfirman dalam surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ayat ini menceritakan tentang tujuan Nabi Muhammad diutus menjadi Rahmat bagi seluruh alam. Pengutusannya dapat pula diartikan sebagai kemaslahatan umat. *Maslahah* secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif dibalik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Menurut Al-Ghazali, bahwa salah satu konsep yang paling penting dan fundamental dalam hukum Islam adalah konsep “*maqashid at-tasyri'*” atau *maqashid asy-syar'iyah* ini yang menegaskan bahwa disyariatkannya hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep inilah yang kemudian diakui oleh para ulama, dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer “dimana ada *maslahah*, disana terdapat hukum Allah Swt”.

Sedangkan dalam *Teori Hukum Progresif* menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Secara konseptual, hukum progresif ingin mengembalikan fungsi hukum agar sesuai dengan tujuannya yaitu

menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, hukum menurut konsep hukum progresif haruslah didedikasikan untuk manusia bukan sebaliknya, dan untuk mewujudkan keadilan, hukum haruslah selalu berkembang dinamis, tidak boleh stagnan dalam bentuk sebuah teks perundang-undangan yang rigid.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jika tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan *tradisianalytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

H. Kajian Terdahulu

Kajian tentang Akibat Hukum Perkawinan yang Pencatatannya Dipalsukan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam secara khusus belum pernah dikaji. Namun dalam literatur yang berhubungan dengan perkawinan dan pemalsuan dalam hukum Islam dan hukum positif dapat dijadikan sebagai referensi untuk kajian ini.

Pembahasan tentang dampak pemalsuan identitas secara umum dapat ditemukan dalam artikel *Ahmad Dailami, Rumba Triana dan Arijulmanan* yang berjudul *Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya peneliti menjelaskan bahwa status hukum pernikahan yang di dalamnya ada pemalsuan data identitas pada persyaratan administrasi pernikahan tetap sah sesuai ajaran Islam apabila syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Maka apabila ada pihak ketiga yang menggugat dan melaporkan pemalsuan tersebut, maka KUA bisa membatalkan pernikahan tersebut melalui Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 73 ayat 3 bahwa diantara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.³⁸

Selanjutnya hasil penelitian Yunesia Pingkanita Pelawi, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*

³⁸ Ahmad Dailami, Rumba Triana dan Arijulmanan, *Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam*, (Al Mashlahah, Vol.06, No.01) dilihat pada tanggal 15 Agustus 2019.

(*Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Medan*), Tesis, 2015.

Dalam penelitiannya diungkap bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan adalah pertama pencabutan buku nikah, kedua tidak menimbulkan masa iddah bagi istri yang perkawinannya dibatalkan, ketiga terhadap harta kekayaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, keempat terhadap anak-anak yang dilahirkan tetap dianggap anak yang sah.³⁹

I. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁴⁰ Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴¹ Adapun penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁴²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sesuai dengan teori Suharsini Arikunto, yaitu penelitian yang didasarkan pada empat filosofis, yaitu pertama fenomenologis, kedua interaksi simbolik, ketiga hasil budi daya manusia dan keempat fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia baik secara normatif maupun historis. Ciri karakteristik penelitian kualitatif antara lain,

³⁹ Yunesia Pingkanita Pelawi, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Medan)*, Tesis, 2015.

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 42.

⁴¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Hukum dalam Praktek* (Jakarta: UII Press, 1991), h. 6.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 27.

mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.⁴³

2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel langsung di Pengadilan Agama Mataram dengan mengumpulkan putusan yang berkaitan dengan perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan, sehingga dapat dilakukan komparasi antara ketentuan dan pelaksanaannya, disamping itu juga penulis akan melakukan penelitian dengan pihak Hakim yang memutuskan.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dan juga penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Dalam penyusunannya menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu kitab-kitab rujukan dan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan melalui wawancara (*interview*) yang biasa dilakukan oleh peneliti dan pengamatan di lapangan.⁴⁴ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadist, Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Hakim, sedangkan yang menjadi data sekundernya adalah berbagai literatur tentang Terjemahan al-Qur'an, Kitab-kitab *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*, Teori Hukum dan *Hukum Perkawinan*, seperti buku "Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga" (Aulia Muthiah), Tindak Pidana Pemalsuan (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian), "Menguak Teori

⁴³ Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2006), h. 14-15.

⁴⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi, Tesis Bisnis*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 12.

Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)” (Achmad Ali), “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi” (Halim HS dan Erlies Setiana Nurbani), “Keadilan Dalam Al-Qur’an” (Amiur Nuruddin), dan lain-lain. Adapun sumber data tersiernya berupa Ensiklopedia, Abstrak, Majalah Varia Peradilan seperti; “Revitalisasi dan Reorientasi Penegakan Hukum di Indonesia (Bagir Manan) dan lainnya. Kajian kepustakaan dalam penelitian ini diarahkan untuk melacak, membaca dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga nantinya dapat ditemukan landasan dalil dan pertimbangan hukumnya, sedangkan pada penelitian lapangannya (*field research*) adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan yang relevan terhadap status hukum perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan.

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan mengkombinasikan perolehan data melalui penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena data-data penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari sumbernya (*data primer*). Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menyiapkan instrumen pertanyaan kepada Narasumber di Pengadilan adalah Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tinggi sampai dengan Hakim Agung.

Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian ini juga dilakukan melalui *library research*, artinya data yang diambil merupakan data yang tersedia pada pihak ketiga (*sekunder*). Data sekunder yang diperoleh dari hasil bacaan buku-buku, jurnal, makalah dan pendapat pakar yang berkaitan dengan pencatatan

perkawinan yang dipalsukan. Data primer dan data sekunder diolah dengan melakukan studi dokumen, review dokumen atau analisis dokumen.⁴⁵ Analisis dokumen dilakukan dengan tahapan-tahapan; kompilasi dokumen, pemilahan dokumen, analisis mendalam dan pengambilan kesimpulan.⁴⁶

4. Teknik Uji Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan uji keabsahan data, dan dalam uji keabsahan data dapat digunakan dengan 3 (tiga) metode : 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif.⁴⁷

Dari tiga jenis teori keabsahan data tersebut penulis akan menguji keabsahan data dengan cara mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menurut:

- a. Sudut pandang Hakim Pengadilan Agama;
- b. Sudut pandang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama;
- c. Menurut sudut pandang Hakim Agung Mahkamah Agung;

5. Metode Analisa

Dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu pengumpulan data dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan dan Reduksi data adalah proses memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari sumber primer dan sekunder sesuai pokok

⁴⁵ Husein Umar, *Metodologi Penelitian...*, h. 85.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 330.

⁴⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta, Gramata Publishing, 2013), h. 76.

masalah pada rumusan penelitian. Data yang relevan akan dianalisis, sedangkan data yang tidak relevan akan disisihkan.

- b. Penyajian data adalah tahapan lanjutan dari proses pengumpulan data dan reduksi data, artinya bahwa terhadap permasalahan yang merupakan issue-issue yang menjadi fokus analisis akan dideskripsikan secara mendalam dari sisi teoritis dan penerapannya sehingga memberi gambaran yang koheren untuk mengerucut pada pengambilan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah berupa pendapat akhir dengan cara analisis komparatif deskriptif sebagai pisau analisis. Komparasi yang dilakukan adalah antara ketentuan Putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Negeri.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung.

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjadi acuan bagi penelitian ini. Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Penjelasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menguraikan tentang Status Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia. Pada Sub Bagian A mencakup Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan dan Asas-Asas Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam sebagai Aturan Normatif Perkawinan Islam di Indonesia. dan pada Sub Bagian B mencakup Pengertian Pencatatan Perkawinan, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Pencatatan Perkawinan sebagai

Upaya Perlindungan Hukum, Pemalsuan dalam Perkawinan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III menguraikan tentang Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia; cakupan pembahasannya meliputi Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama, Kewenangan Pengadilan Agama, Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia, Pencatatan Perkawinan oleh Pengadilan Agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia.

Bab IV membahas tentang Status Perkawinan dengan Pencatatan yang Dipalsukan yang mencakup Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perkara Perkawinan Dengan Pencatatan yang Dipalsukan dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Perkawinan tanpa Pencatatan.

Merupakan pembahasan akhir dalam disertasi ini adalah terdapat dalam bab ke V yang berisi Kesimpulan dan Saran sebagai penutup. Setelah terselesaikannya penulisan dari Bab I hingga Bab V, penulis melengkapinya dengan daftar kepustakaan, lampiran-lampiran serta biodata penulis.